



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan Kode Pos : 62217
Telp. (0322) 321019, Fax. (0322) 321019 e-mail : inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 5 Agustus 2024

Nomor	:	700/224.8/LHP/413.201/2024	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth.Bapak Bupati Lamongan
Lampiran	:	-	di
Perihal	:	Laporan Hasil Reviu Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan Semester I Tahun 2024	L A M O N G A N

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan Reviu Pengelolaan Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/KEP/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

A. Reviu Penetapan Konteks

Mengidentifikasi sasaran strategis/program, strategis/kegiatan/ proses bisnis Unit Pemilik Risiko (UPR) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

1. Memastikan apakah identitas pemilik risiko dan periode penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan ruang lingkup dan sasaran reviu.
2. Memastikan apakah identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra)/Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pemilik Risiko. Bandingkan dokumen Renstra/PK unit kerja dengan isian Formulir Penetapan Konteks.

Pada saat Reviu Penetapan Konteks Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, identitas dan periode telah sesuai dengan tahun berjalan dan telah sesuai dengan ruang lingkup, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis sesuai dengan Formulir Penetapan Konteks.

B. Reviu Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran

1. Kertas kerja atas perumusan/penilaian risiko bidang/unit kerja telah dibuat.
2. Memastikan risiko-risiko yang diidentifikasi telah mewakili masing-masing konteks minimal konteks Sasaran Strategis (Sastra) yang ada di dokumen Renstra/PK. Kecukupan risiko yang diidentifikasi dinilai memadai jika atas konteks Sastra telah diidentifikasi, minimal 1 (satu) risiko atas masing-masing jenis Sastra.
3. Melakukan analisis keselarasan pernyataan risiko dengan konteks yang ditetapkan.
4. Melakukan analisis kausalitas, apakah uraian dampak pada formulir identifikasi risiko memiliki korelasi/hubungan sebab akibat dengan pernyataan risiko.

Pada saat Reviu Identifikasi Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengidentifikasi seluruh potensi masalah yang relevan dan terkait dengan pencapaian sasaran.

C. Reviu Analisis Risiko

Menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan.

1. Menelaah dokumen apakah semua risiko telah ditentukan besaran dan levelnya sesuai dengan matriks analisis risiko.
2. Memastikan konsistensi kode risiko pada formulir identifikasi risiko dengan formulir analisis risiko.
3. Melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait justifikasi dalam penentuan skor probabilitas dan dampak dan apakah penentuan skor tersebut telah berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan uji petik untuk memastikan apakah kriteria risiko telah digunakan dengan tepat dalam penentuan level risiko.

5. Telah dibuat kertas kerja atau wawancara terhadap unit kerja untuk mengetahui teknik atau cara yang digunakan dalam menentukan level risiko.
6. Besaran risiko pada kertas kerja telah konsisten dengan *risk register*.
7. Menelaah dokumen apakah pengendalian intern telah dipertimbangkan dalam mengestimasi level risiko.

Dari hasil Reviu Analisis Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Risiko untuk menilai akurasi level risiko unit kerja, besaran skala dampak dan kemungkinan telah dilakukan dengan berpedoman pada kriteria kemungkinan dan dampak sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku. Namun dari hasil Reviu Analisis Risiko, jumlah responden analisa risiko belum sesuai. Berdasarkan Form 1.a CEE pada aplikasi simario, belum ada responden mengisi kuisioner pada form tersebut (0 responden).

Disarankan agar menambah jumlah responden minimal 30% dari jumlah pegawai untuk menjawab kuisioner pada Form 1.a CEE yang mewakili seluruh bidang/urusan.

D. Reviu Evaluasi Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah memiliki risiko prioritas.

1. Apakah penilaian atas risiko prioritas telah dilakukan dengan tepat yaitu bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada di atas selera risiko tersebut.
2. Analisis dokumen atas keputusan untuk memitigasi atau tidak memitigasi suatu risiko yang diambil oleh unit kerja ((Notulen Rapat Focus Discussion Group (FGD) .
3. Menelaah dokumen apakah unit kerja telah mendokumentasikan aktivitas evaluasi risiko dengan baik. (Form Evaluasi)

Dari hasil Reviu Evaluasi Risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disimpulkan bahwa risiko prioritas merupakan risiko yang levelnya berada di atas selera risiko.

E. Reviu Respon Risiko

Memastikan bahwa unit kerja telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas.

1. Dapatkan daftar risiko prioritas, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
2. Memastikan penyebab yang diidentifikasi merupakan akar penyebab dari risiko prioritas.

3. Membandingkan RTP dengan daftar risiko prioritas. Pastikan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya.
4. Cek kertas kerja RTP, pastikan penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.
5. Penentuan penanggung jawab yang tepat terkait dengan pihak yang menangani risiko tersebut jika terjadi.

Dari hasil Reviu Respon Risiko dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan respon yang tepat untuk mengatasi risiko prioritas dan seluruh risiko prioritas telah disusun RTP-nya, penanggung jawab dan target waktu telah ditentukan.

F. Reviu Informasi dan Komunikasi

Memastikan bahwa kegiatan informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam penerapan manajemen risiko telah dilakukan dengan memadai oleh unit kerja, yakni menganalisis apakah terdapat RTP yang belum diinformasikan sesuai jadwal, apa penyebabnya, serta solusi yang akan dilaksanakan.

Dari hasil Reviu Informasi dan Komunikasi disimpulkan bahwa seluruh RTP telah diinformasikan sesuai jadwal.

G. Reviu Pemantauan

Memastikan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP, telah dipantau secara memadai.

1. Dapatkan kertas kerja pemantauan pelaksanaan RTP
2. Membandingkan kertas kerja pemantauan dengan daftar RTP
3. Mengecek apakah RTP yang dijadwalkan s.d. triwulan yang direviu telah dilaksanakan atau RTP pada triwulan berikutnya yang telah dilaksanakan mendahului jadwal
4. Dapatkan informasi penyebab apabila terdapat RTP yang tidak/terlambat direalisasikan
5. Dapatkan kertas kerja pemantauan keterjadian risiko
6. Mengecek apakah ada keterjadian risiko
7. Mengecek apakah keterjadian risiko telah dicatat pernyataan risiko terkait, waktu kejadian, tempat kejadian, dan pemicu keterjadian
8. Mengecek apakah ada keterjadian risiko yang belum teridentifikasi
9. Menganalisis apakah rekomendasi yang diusulkan telah tepat.

Hasil Reviu Pemantauan menunjukkan bahwa keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP telah dipantau secara memadai dan kejadian telah tercatat.

H. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Dari risiko yang muncul telah dibuatkan RTP dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan. Namun dari hasil Reviu Analisis Risiko, jumlah responden analisa risiko belum sesuai. Berdasarkan Form 1.a CEE pada aplikasi simario, belum ada responden mengisi kuisioner pada form tersebut (0 responden).

I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni menambah jumlah responden minimal 30% dari jumlah pegawai untuk menjawab kuisioner pada Form 1.a CEE yang mewakili seluruh bidang/urusan.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Managemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

**INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN**

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Arsip
-

Reviu penetapan konteks antara renstra dengan MR sesuai

Screenshot of a web browser showing the Simario - Periode 2024 dashboard. The search bar shows "Ket: Semua OPD dan Penda : Pelaporan Dilaksanakan Awal Tahun". The main content area displays a table of risk management reports:

No	Nama Laporan	Entitas
1	LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIWULAN 1 BAKESBANGPOL	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIWULAN 2 BAKESBANGPOL	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Below this, there are sections for "2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko", "3. Pelaporan Reviu Unit Pengawasan", and "4. Pelaporan Evaluasi Unit Pengawasan".

At the top of the page, there is a Microsoft Edge toolbar with various icons for file operations, search, and navigation.

The middle section shows a screenshot of a PDF document titled "Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan". The table content is as follows:

No	Visi/Misi/Program Kerja Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	<p>Visi : "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"</p> <p>Misi 4 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religius, berbudaya, aktif dalam pembangunan serta lingkungan yang aman dan tenrat</p> <p>Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmoni sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Toleransi</p> <p>Indikator : Nilai Toleransi</p>	<p>Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	<p>Semakin berkangranya rasa persatuhan dan kesatuan bangsa di lingkungan Kab. Lamongan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intoleransi ▪ Lunturnya rasa cinta tanah air ▪ Lemahnya Implementasi nilai-nilai Pancasila ▪ Kuatnya arus Globalisasi ▪ Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa memobilkan kerawanan konflik di masyarakat ▪ Pembinaan Ormas belum optimal ▪ Kesadaran Ormas untuk Mendaftar ▪ Masih adanya paham radikalisme an terorisme di masyarakat ▪ Adanya tawuran antara perguruan silat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) ▪ Pemberian pemahaman tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan ▪ Keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial ▪ Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat

The bottom section shows a screenshot of the "Dinas Terkait" page, displaying a table of relevant departments:

No	Periode	Tujuan
1	Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Penilaian: 2024	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal
2	Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Penilaian: 2023	Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

1	2	3
Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	1. Prosentase Konflik ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang ditanganai 2. Persentase Peningkatan Pendidikan Politik 3. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan Presiden dan pemilihan DPD/DPR/ DPRD 4. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Gubernur 5. Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	100% 81,30% 78,53% 62,00% 77,24%
Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat		
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89,35

Program Anggaran Keterangan

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.825.414.000,-	APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila	Rp. 430.000.000,-	APBD

A. Reviu Identifikasi Risiko

Sesuai / nyambung 1 satsra = 1 identifikasi risiko

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dimilai	2024
Tujuan Strategis	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik
Urusan Pemerintahan	Ketentraman, Keteribinan Umum, dan Pertindungan Masyarakat, Politik
OPD yang dimilai	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tujuan Strategis Pemerintah	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik
Sasaran	1. Meningkatnya harmonisasi sosial dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak			Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena		
1	Percentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang ditanganai	Majemuknya Potensi Konflik dapat terjadi sewaktu waktu	RSO.24.05.06.01	Kepala Badan	Adanya perbedaan antar individu dan kelompok	Eksternal	C	Majemuknya konflik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis	Masyarakat dan Pemerintah	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
2	Percentase peningkatan pendidikan politik	Tingginya angka golput masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu	RSO.24.05.06.02	Kepala Badan	Sasarannya pendidikan politik belum dilakukan secara menyeluruh	Internal	C	Kesadaran politik masyarakat masih rendah	Masyarakat dan Pemerintah	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	
3	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.24.05.06.03	Kepala Badan	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Internal	C	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	Bakesbangpol dan Pemerintah	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>	

Responden kurang

The screenshot shows a web interface for the CEE (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) of the Lamongan Regency Inspection Board. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, RPJMD, Renstra, Renja, Dinas Terkait, and Pelaporan. The main content area is titled 'CEE' and 'CEE OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik'. It displays the following data in a table:

Cee	Keterangan	
Pertanyaan	Sub Unsuer 8 - Pertanyaan 37	Lengkapi
Responden	Jumlah Responden Terkumpul 0	Bagikan
Review Responden		Review

At the bottom of the page, there is a copyright notice: Copyright © 2024. The browser's taskbar at the bottom shows various pinned icons and the system tray with weather information (34°C Cerah), date (04/09/2024), and time (14:32).

H. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Dari risiko yang muncul telah dibuatkan RTP dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan. Namun dari hasil Reviu Analisis Risiko, jumlah responden analisa risiko belum sesuai. Berdasarkan Form 1.a CEE pada aplikasi simario, belum ada responden mengisi kuisioner pada form tersebut (0 responden).

I. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu dilakukan perbaikan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni menambah jumlah responden minimal 30% dari jumlah pegawai untuk menjawab kuisioner pada Form 1.a CEE yang mewakili seluruh bidang/urusan.

Demikian kami sampaikan hasil Reviu Managemen Risiko Semester I Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan untuk menjadi perhatian.

INSPEKTUR
† KABUPATEN LAMONGAN †

† A. FARIKH, S.H., M.M.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Arsip